COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTANIAN HORTIKULTURA DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO

Disusun Dan Diusulkan Oleh :

RAHMAD NUR

Nomor Stambuk : 105641110616

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTANIAN HORTIKULTURA DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN JENEPONTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RAHMAD NUR

Nomor Stambuk : 105641110616

Kepada

08/09/2021
1 exp
Smb. Alumni
R/0109/IPM/21 CO
NUR

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kab. Jeneponto

Judul Proposal Penelitian : Rahmad Nur

Nomor Stambuk : 10564111061 6

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Muhiddin, M.Si	Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui,

Dekan	Ketua Program Studi
Fisipol Unismuh Makassar	Ilmu Pemerintahan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M. Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Rabu 25 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua	**Sekretaris**
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si**

Penguji

1. Dr. H.Lukman Hakim, M.Si (Ketua) (.....)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si (.....)
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahmad Nur

Nomor Stambuk : 105641110616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia merima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 23 Oktober 2020

Yang menyatakan

Rahmad Nur

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Rahmad Nur 2020. ***Collaborative Governance*** **Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto** (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ansyari Mone).

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi . Melihat potensi pertanian hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto tentu membutuhkan sentuhan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaannya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian pendekatan fenomenalogi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dengan informan pokok 10 orang. Teknik analisis data ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulansi sumber, metode pengumpulan data, dan triangulansi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga (3) indikator *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kab. Jeneponto, yaitu: Pemerintah yang mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi regulasi, fungsi koordinasi , dan fungsi transparansi. Selanjutnya, Swasta mempunyai fungsi menyediakan bantuan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan SDM para pelaku usaha yang berasal dari sektor swasta melalui kegiatan penyuluhan sebagai upaya peningkatan kapastitas SDM dalam pengelolaan pertanian. Indikator yang terakhir adalah Masyarakat, mempunyai fungsi membangun komunikasi dalam menyampaikan segala masalah dan kebutuhan pengelolaan pertanian kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha, kemudian ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Terakhir, pengorganisasian melalui pembentukan kelompok tani segala permasalahan petani di lembagakan.

Kata Kunci : *Colaborative Governance* dan Pertanian Holtikultura

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kab. Jeneponto**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Amir Muhiddin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga proposal ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Dr.Nuryanti Mustari S.IP., M. Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada

penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Kepada kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantisa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman yang membantu saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 Oktober 2020

Rahmad Nur

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan ii
Halaman Penerimaan Tim iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah iv
Abstrak v
Kata Pengantar vi
DaftarIsi vii
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penulisan 8
D. Manfaat Penulisan 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 10
B. Konsep *Collaborative Governance* 13
C. Konsep Pertanian Holtikultura 20
D. Konsep Pemerintah Daerah 28
E. Kerangka Pikir 31
F. Fokus Penelitian 33
G. Deskripsi Fokus Penelitian 33

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 37
B. Jenis dan Tipe Penelitian 37
C. Sumber Data 38
D. Informan Penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Teknik Analisa Data 40
G. Keabsahan Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 44
B. *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 53
   1. Pemerintah 53
   2. Swasta 65
   3. Masyarakat 73
C. Pembahasan 82

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor holtikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan.

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Beberapa hal yang mendasari pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain; potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan memegang peranan penting dalam sumber pendapatan petani, perdagangan, maupun penyerapan tenaga kerja. Komoditas tanaman hortikultura di Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman hiasDalam kehidupan sehari-hari banyak manfaat dan keuntungan yang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

diperoleh dari tanaman hortikultura dalam kehidupan masyarakat antara lain: memperbaiki dan meningkatkan nilai gizi masyarakat, mempercantik atau memperindah lingkungan sekitar, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan menambah devisa negara.

Peranan pemerintah dalam proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing Negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Dalam pembangunan negara Indonesia, perekonomian perlu dikembangkan secara terencana dan terpadu. Pembangunan yang dilakukan sudah pasti menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat. Namun demikian, tetap harus memperhatikan minoritas yang mempunyai kesamaan hak dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi daerah-daerah di seluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa disamaratakan dengan alasan perbedaan karakteristik, budaya, keadaan sosial dan sebagainya. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan nasional bisa terlihat dari pembangunan daerah-daerah yang ada.

Pemerintahan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Salah satunya kepada pengelolaan pertanian hortikultura. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan global yang terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

yang semakin global menuntut peran-peran instansi pemerintah bisa mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi.

Peranan Pemerintah Daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah. Peranan yang diberikan yaitu dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung. Peranan lain yang tidak kalah pentingnya berupa bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan selama lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan mendasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya perubahan ini tak hanya berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, tetapi berdampak pula terhadap perubahan kebijakankebijakan dalam pembangunan daerah, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pada hakikatnya, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dalam pembangunan daerah, terdapat tiga pilar yang berperan signifikan, yaitu negara atau pemerintah (*the state*), investor atau swasta (*the private sector*), dan organisasi sipil masyarakat (*civil society organization*).

Administrator publik modern harus mampu berperan aktif membangun paham kolektif tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi yang cepat atas dasar pilihan seseorang, akan tetapi untuk membangun kreasi lahirnya kepentingan dan tanggung jawab bersama.

Collaborative governance diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Pada sisi lain, sering terjadi pula pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat pada proses pembangunannya. Kegagalan usaha tersebut salah satunya disebabkan pendekatan utama pembangunannya tidak dilakukan pada masyarakat marginal. Hambatan dan kekurangan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

keberhasilan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif memerlukan reorientasi kembali pendekatan pembangunan dengan paradigma baru. Diperlukannya pendekatan paradigma baru pembangunan yang merupakan satu upaya menjawab kegagalan dalam mengartikan urgensi pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Selama ini yang terjadi, pembangunan diselenggarakan berdasarkan mandat pemerintah, bukan atas dasar mandat rakyat, sehingga yang terjadi kemudian yaitu peran pemerintah sangat dominan, selain kebijakan sepihak pemerintah juga seringkali muncul.

Pembangunan yang terselenggara sejak era Orde Lama hingga Orde Baru dan bahkan orde reformasi saat ini belum memiliki orientasi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya pembangunan yang bergulir selama beberapa dekade terakhir menjadi tidak berkualitas. Salah satu indikatornya, meskipun pertumbuhan ekonomi umumnya relatif stabil dari tahun ke tahun, namun kesejahteraan rakyat belum terwujud secara riil.

Hal ini terutama disebabkan pada saat pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan yang akhirnya menghasilkan keputusan sepihak, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang dikenal dengan *community based development* (CBD), yaitu pembangunan berbasis komunitas merupakan paradigma pembangunan baru yang saat ini banyak digunakan dalam proses pembangunan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Prasyarat dasar untuk memenuhi tujuan tersebut membutuhkan penyamaan persepsi, kehendak, dan semangat dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya alam dalam era otonomi daerah secara demokratis. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan daerah.

Permasalahan kolaborasi yang terjadi timbul karena keterbatasan pemerintah menjawab setiap permasalahan publik didalam sektor pertanian hortikultura. Melihat hal tersebut, maka pemerintah di Kecamatan Rumbia mengajak beberapa aktor lain seperti swasta dan masyarakat untuk melakukan kolaborasi dalam meningkatkan sektor pertanian hortikultura di Kecamatan Rumbia. Dengan adanya konsep collaborative governance, pemerintah juga dapat menjawab permasalahan publik yang sering terjadi dalam sektor pertanian hortikultura.

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika. Salah satu produk pertanian tropika Kecamatan Rumbia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran (Hortikultura). Jenis tanaman sayuran yang di usahakan di Kecamatan Rumbia antara lain bawang merah, cabe Besar, kubis, wortel dan kentang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kabupaten Jeneponto mempunyai potensi yang cukup besar untuk memproduksi sayuran organik, petaninya mudah menerima edukasi dan inovasi. Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 – 1.400 mdpl (Monitor 2018). Dengan kondisi tanah seperti ini sangat cocok untuk mengembangkan sayuran seperti bawang merah, cabai, wortel, kentang, kubis dan buncis.

Selain itu komoditi buah seperti mangga dan markisa dataran rendah. Tentu dengan mengkonsumsi makanan tanpa bahan kimia akan lebih meningkatkan kesehatan tubuh.

Melihat potensi pertanian hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto tentu membutuhkan sentuhan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaannya, terlebih masyarakat petani masih mengalami masalah seperti permodalan dan alat pertanian. Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Dinas Pertanian tentu harus membangun sinergitas dengan beberapa instansi terkait untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengangkat judul *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk *collaborative governance* dalam meningkatkan pengelolaan sektor pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bentuk dari *collaborative governance* dapat meningkatkan pengelolaan sektor pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan produktivitas dari petani.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :

Untuk mahasiswa yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto sehingga dapat mengatasi permasalahan pertanian bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis :

a. Manfaat untuk pemerintah

Pemerintah dapat mengetahui permasalahan sektor pertanian hortikultura yang terjadi dan membangun kolaborasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi segala permasalahan yang terkait pertanian hortikultura khususnya di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Manfaat untuk masyarakat

Masyarakat dapat memberikan sumbansi pemikiran kepada pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pengelolaan sektor pertanian hortikultura dan masyarakat dapat melihat kinerja dari pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui sektor pertanian khususnya hortikultura.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada proses penyusunan karya ilmiah, penulis membandingkan judul penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gandasari Dkk (2015) dengan judul penelitian Proses Kolaboratif Antara Pemangku Kepentingan Pada Konsorsium Anggrek Berbasis Komunikasi	Mengidentifikasi proses kolaborasi pada konsorsium anggrek melalui identifikasi proses interaksi, akomodasi komunikasi dan struktur komunikasi pada konsorsium anggrek	Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Proses interaksi komunikasi yang terjadi dalam beberapa pertemuan pada konsorsium anggrek terdapat notulen rapat secara lengkap tentang proses akomodasi yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Studi dalam proses kolaboratif diperlukan untuk memperkaya kajian proses kolaboratif berbasis komunikasi.

2	Walewangko (2015) judul Strategi Pengembangan Pertanian Organik Sayuran Di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon	Mengidentifikasi kondisi internal : kekuatan, kelemahan, dan eksternal : peluang, ancaman dalam pengembangan pertanian organik sayuran di kelurahan kakaskasen dua kecamatan tomohon utara kota tomohon dan merumuskan strategi pengembangan pertanian organik sayuran di kelurahan kakaskasen dua kecamatan tomohon utara kota Tomohon.	Metode pengumpulan data adalah metode survey. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi kekuatan untuk pengembangan pertanian organic sayuran adalah petani telah berpengalaman dan menguasai teknologi, mempunyai kerjasama dengan Dinas Pertanian, Lurah Kakaskasen dua, dan BP3K.
3	Natalia dan Madiono (2013)	Mendeskripsikan pengelolaan usaha,	Metode Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

	judul penelitian Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Hortikultura Pada Pt. Horti Bima International	potensi eksternal, potensi internal, dan menyusun strategi pengembangan usaha hortikultura pada PT. Horti Bima International	Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Horti Bima International telah menerapkan fungsi manajemen pada tiaptiap aspek bisnisnya. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dapat diketahui bahwa ancaman dari pesaing karena letaknya berdekatan, potensi munculnya pesaing baru, dan ketergantungan bibit dari pemasok luar negeri. Strategi bersaing PT. Horti Bima International, yaitu fokus dengan nilai terbaik, aktivitas pemasaran perusahaan difokuskan untuk membina hubungan baik dengan pelanggan .

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada wilayah strategi yang dilakukan dalam proses pengelolaan dalam mengembangkan kegiatan pertanian termasuk melihat bentuk-bentuk ancaman yang bisa berdampak pada hasil pertanian hortikultura. Selain itu ada bentuk kerjasama yang dilakukan antara masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait pada wilayah pertanian tapi hanya menekankan kepada proses sosialisasi semata. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya bahas menekankan kepada bentuk dan tahapan-tahapan kolaborasi dalam pemerintah dalam rangka pengelolaan pertanian Hortikultura sehingga bisa dilihat nantinya apakah bentuk kolaborasi tersebut dapat mendukung pengelolaan pertanian hortikultura.

B. Tinjauan Teori/Konsep

1. Konsep Collaborative Governance

a. Definisi Collaborative Governance

Collaborative governance antara institusi menjadi isu penting dalam ilmu pemerintahan mengingat banyak persoalan pemerintah yang memiliki impliaksi luas yang tidak bisa ditangani secara optimal dan dipecahkan secara tuntas jika hanyak mengandalkan pada suatu intitusi pemerintahan saja. Melalui kolaborasi ini diharapkan persoalan yang dihadapi bisa diatasi atau paling tidak bisa diminimalisir secara signifikan.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapain tujuan yang

tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut (Sudarmo, 2009: 123).*Governance* mengindikasikan disesiminasi otoritas dari *single actor* menjadi multi-aktor. Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep *governance*, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh aktor tunggal yakni pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat. dengan adanya *governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahaan dan urusan-urusan public (Ulum dan Ngindana 2017:6).

Terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurusi kepentingannya sendiri

yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi (Abidin dkk 2013:10).

Dalam pembangunan daerah, terdapat tiga pilar yang berperan signifikan dalam proses Kolaborasi, yaitu (Sedarmayanti, 2012: 4):

a. Negara atau pemerintah (*the state*).
b. Investor atau swasta (*the private sector*).
c. Organisasi sipil masyarakat (*civil society organization*).

Collaborative Governance sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut (Kumorotomo, 2013:10). Kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, stategi bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyempaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun merka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011:251).

Collaborative governance adalah serangkain pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan

deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset (Ansell dan Gash 2007:546).

Secara khusus, *collaborative governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horisontal sukarela dan hubungan horizontal anatara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral (Chang 2009:76-77).

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. menyebutkan bahwa *collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh public (Junaidi 2015:8).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukan oleh Ansell dan Grash dalam Sudarmo bahwa *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini (Junaedi, 2015:10):

a. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi.
b. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam.
c. Upaya mencarai cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik.
d. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.
e. Ketidakmampuan kelompokkelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
f. Mobilisasi kelompok kepentingan.
g. Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Collaborative governance merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitariansime dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepakan kepentingan *society*. Kolaborasi antara *government*, *civil society*, dan *private sector* merupakan langkah-langkah optimalisasi peran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

government dalam implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah yang di dalamnya untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Subarsono, 2016:174).

Collaborative governance muncul dan dikembangkan secara adaptif untuk merespom adanya kompleksitas dan konflik-konflik bernuansa politik atau persoalan-persoalan yang menuntut diadopsinya nilai-nilai demokrasi, namun konsep tersebut tidak atau belum diinspirasikan oleh filosofi politis teori tertentu. Kecenderungan bahwa dilakukannya *collaborative governance* didorong oleh adanya upaya pragmatisme dalam menyelesaikan masalah yang selama ini tidak kunjung teratasi melalui penerapan teori-teori konvisional yang selama ini dipercaya mampu mengatasi masalah (Sudarmo,2010).

Collaborative governance di bagi menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut (Morse & Stephens, 2012: 567-569):

a. *Assessment*
b. *Initiation*
c. *Deliberation*
d. *Implementation*

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasistas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelakasanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi

faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyatakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016:174).

Politik kepemimpinan yang inovatif (*forward-looking*) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif, dan memberikaan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan di atas tetapi bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif melalui kemitraaan. Kolaborasi bisa saja terhambat, jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif.

Dengan demikian dalam proses kolaborasi pemerintahan dalam peningkatan pembangunan, pada dasarnya unsur-unsur dalam kepemerintahan (*governance stakeholders*) meliputi tiga dominan yaitu Negara atau pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2012: 4).

Sebagai kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan budaya kerja yang terlepas dari hirarkhi sehingga mendorong penentuan pembuatan ketentuan-ketentuan baru guna memberdayakan masing-masing pihak atau aktor untuk mencapai tujuan bersama.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Pertanian Holtikultura

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki arti dan kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini berperan sebagai sumber penghasil bahan makan, sumber bahan baku bagi industri, mata pencaharian sebahagian besar penduduk, penghasil devisa negara dari ekspor komoditinya bahkan berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan nasional.

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respons terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan di alam bebas akibat laju pertambahan manusia (Nurmala 2012).

Pertanian dalam arti sempit adalah pertanian bercocok tanam,yaitu pertanian rakyat dan pertanian perkebunan. Pertanian dalam arti luas adalah meliputi bercocok tanam (Pertanian rakyat dan perkebunan), kehutanan, perternakan, dan, perikanan (Harahap, 2012).

Sampai era reformasi sekarang, tampaknya sektor pertanian masih dan akan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia (>60%) tinggal di pedesaan dan lebih dari separuh penduduk tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Harijati 2007).

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan pertanian yang telah dicapai, proses transformasi struktural perekonomian nasional akan terus berlangsung dengan ciri sebagai berikut (Safaruddin 2010):

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. Peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja semakin menurun.

b. Pangsa ekspor bahan setengah jadi dan jadi semakin besar.

c. Keterkaitan antar berbagai sektor pertanian semakin tinggi.

d. Daerah pedesaan semakin terbuka, baik berupa hubungan antar desa, serta antar desa dan kota, maupun berupa arus informasi sehingga pola pikir petani semakin kritis dan rasional.

e. Terjadinya perubahan pola berusaha tani dari orientasi peningkatan produksi semata-mata ke orientasi pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam rangka meraih nilai tambah hasil produksi pertanian yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Posisi sektor pertanian sebagai salah satu kegiatan perekonomian di Negara berkembang sering menempati urutan terbawah dari segi kesejahteraan pelakunya.pertanian sering diperas demi kemajuan sektor lain, terutama sektor industry, yaitu menyediakan pangan yang murah dan tenaga buruh dengan upah rendah (Rahmanta, 2012).

Pertanian mempunyai hubungan erat dan kait mengkait dengan sektorsektor perekonomian lainnya misalnya sektor perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Untuk mempercepat proses pembangunan pertanian terbukti diperlukan peningkatan kegiatan yang sim0ultan dalam hampir semua sektor yang ada. Departemen dalam negeri, perhubungan, penerangan, tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi, bahkan departemen

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sosial dan agama ikut mengambil bagian yang aktif dalam usaha-usaha pembangunan inti dari departemen pertanian (Firdaus 2012).

Beberapa persoalan ekonomi pertanian penting yang perlu mendapat perhatian antara lain (Rahmanta 2012):

a. Jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan dalam pertaniaan.
b. Pembiayaan pertanian
c. Tekanan penduduk di daerah pertanian
d. Daya saing sektor pertanian
e. Kesejahtraan petani, kemiskinan, dan ketimpangaan pendapatan.

Upaya perwujudan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia, diperkirakan akan terwujud melalui pendekatan strategi pembangunan agribisnis nasional yaitu (Saragih dalam Asriani, 2003:148):

a. Pembangunan agroindustri sebagai motor penggerak agribisnis. Di masa lalu, ketoka orientasi pembangunan pertanian terletak pada peningkatan produksi, yang menjadi motor penggerak sektor agribisnis adalah usahatani. Dewasa ini dan di masa yang akan datang, orientasi sektor telah berubah kepada orientasi pasar, dengan berlangsungnya perubahan preferensi konsumen yang semakin menuntut atribut produk yang lebih rinci dan lengkap, maka motor penggerak sektor agribisnis harus berubah dari usaha tani kepada industri pengolahan (agroindustri).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Pengembangan strategi pemasaran. Pembangunan sektor agribisnis yang berorientasi pasar menyebabkan strategi pemasaran menjadi sangat penting, bahkan paling menentukan keberhasilan. Pengembangan strategi pemasaran ini semakin penting peranannya terutama mengahadapi masa depan, dimana preferensi konsumen terus mengalami perubahan.

c. Pengembangan sumberdaya agribisnis. Agar sektor agribisnis mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknollogi, serta pembangunan kemampuan sumber daya manusia agribisnis sebagai actor pengembangan sektor agribisnis.

d. Penataan dan pengembangan struktur agribisnis. Struktur agribisnis nasional yang terkotak-kotak telah menciptakan transmisi dan margin ganda, yang secara keseluruhan akan merugikan perkembangan sektor agribisnis nasional. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan sektor agribisnis perlu memperoleh perhatian yang serius. Penetaan dan pengembangan struktur agribisnis nasional diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu:

   a) mengembangakan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal mengikuti satu aliran produk (*produk line*) sehingga subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis pertanian primer

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dan subsistem agribisnis hilir berada dalam suatu keputusan manajemen

b) mengembangkan organisasi bisnis (ekonomi) petani agar dapat merebut nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir.

e. Pengembangan pusat pertumbuhan agribisnis. Selama ini, lokasi perkembangan agroindustri nasional umumnya berorientasi pada konsentrasi konsumen seperti sektor perkotaan dan di pulau jawa yang merupakan pusapusat konsumen. Di masa yang akan datang, orientasi lokasi agroindustri tersebut telah diubah. Dari orientasi pusat-pusat konsumen ke orientasi sentra produksi bahan baku.

f. Pengembangan infrastruktur agribisnis. Untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis tersebut, diperlukan pengembangan infrastruktur agribisnis, seperti jaringan jalan dan transportasi (laut, udara, sungai dan darat) jaringan listrik, air, pelabuhan perikanan dan peternakan, pelabuhan ekspor dan lain-lain.

Hortikultura adalah gabungan ilmu, seni, dan teknologi dalam mengelola tanaman sayuran, buah, ornamen, bumbu-bumbu dan tanaman obat obatan. Hortikultura merupakan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, dan berbagai tanaman hias, hortikultura saat ini menjadi komoditas menguntungkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka pendapatan masyarakat yang juga meningkat (Zulkarnain 2009).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hortikultura berasal dari bahasa latin, yaitu hortus (kebun) dan colere (menumbuhkan). Secara harfiah, hortikultura berarti ilmu yang mempelajari pembudidayaan kebun. Hortikultura merupakan cabang pertanian yang berurusan dengan budidaya intensif tanaman yang di ajukan untuk bahan pangan manusia obat-obatan dan pemenuhan kepuasan (Zulkarnain, 2009).

Keberhasilan pengembangan hortikultura ditentukan oleh kecanggihan dan kelengkapan komponen teknologi yang dirakit dalam sistem budidayanya. Hal ini terutama benar apabila hortikultura akan diperankan sebagai ujung tombak agroindustri dan agribisnis. Dengan mengembangkan hortikultura, penggunaan lahan untuk pertanian dapat dihemat. Dengan demikian dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dapat berkurang kegawatannya (Noorlatifah 2012).

Hortikultura adalah komoditas yang akan memiliki masa depan sangat cerah dilihat dari keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya dalam pemulihan perekonomian Indonesia waktu mendatang. Oleh karenanya usaha hortikultura patut untuk dikembangkan ada saat ini. Hortikultura dikelompokkan menjadi 6 yaitu (Sobir 2009):

a. Tanaman Buah-buahan (*pomology*): kelompok tanaman ini memiliki keanekaragaman morfologi, seperti ada yang berbentuk pohon (misalnya rambutan, mangga,durian, jeruk, dan sebagainya), atau bentuk semak markisa.

b. Tanaman sayuran (*olerikultur*): tanaman ini merupakan tanaman hortikultura yang utama. Bagian tanaman tersebut dapat berasal dari

daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah ataupun biji.Berbeda dengan tanaman buah - buahan, sayuran memiliki umur yangrelatif singkat. Tanaman ini umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar oleh karenanya proses penanganannya lebih spesifik dibandingkandengan hortikultura lainnya.

c. Tanaman Hias (*florikultura*): Manfaat dari tanaman hias ini adalah meningkatkan estetika lingkungan. Budidaya tanaman ini dapat dilakukan pada ruang terbukamaupun tertutup.

d. Lanskap arsitektur. Lanskap menggunakan tanaman tertentu yang dipadukan dengan elemen-elemen lainnya untuk menghasilkan pemandangan yangindah. Aspek utama dalam lanskap arsitektur ini adalah penutupan permukaan tanah yang umumnya diwakili dengan rumput. Lanskap arsitektur sedemikian pentingnya karena dapat memuaskan masyarakat yang melihatnya dan berpengaruh terhadap efek fisiologis manusia.

e. Tanaman obat-obatan. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ramuan tradisional.Dimana bahan-bahan tersebut diambil dari berbagai bagian dari tanaman tersebut.

Peraturan Menteri Perdagangan No.60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura menjelaskan bahwa : Mewajibkan para importir produk hortikultura untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, dan penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Selain itu para importir juga harus memenuhi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

persyaratan kemasan dan pelabelan, standar mutu serta ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.

Hortikultura merupakan suatu cabang dari ilmu pertanian yang mempelajari budidaya buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Sedangkan dalam GBHN 1993-1998 selain buah-buahan, sayuran dan tanaman hias, yang termasuk dalam kelompok hortikultura adalah tanaman obat-obatan.Ditinjau dari fungsinya tanaman hortikultura dapat memenuhi kebutuhan jasmani sebagai sumber vitamin, mineral dan protein (dari buah dan sayur), serta memenuhi kebutuhan rohani karena dapat memberikan rasa tenteram, ketenangan hidup dan estetika (dari tanaman hias/bunga) (Zulkarnain 2009).

Hasil pertanian baik buah maupun sayuran yang telah dipanen masih mengalami proses kehidupan, respirasi, atau pernafasan. Berlangsungnya proses kehidupan pada hasil panen sangat bervariasi, tergantung jenis tanamannya. Ada berbagai bentuk kehilangan dalam pasca panen sayuran, yaitu penurunan nilai gizi, membusuk, penurunan secara fisik dan daya tarik. Selama penanganan, hal tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan pasca panen (Setyowati, 2007).

Pertanian hortikultura merupakan pertanian dengan menggunakan tekhnik adalah tanam yang ditanam seperti sayur-sayuan, buah-buahan, ataupun tanaman hias dimana lahan (kebun atau pekarangan rumah) sebagai tempatnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa indonesia berarati pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cornelis 2016).

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan.

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah (Rahayu 2018).

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungssi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah (Serajuddin 2016).

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas (Asmawi 2014):

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

a. kepastian hukum;tertib penyelenggara Negara.

b. kepentingan umum.

c. Keterbukaan.

d. Proporsionalitas.

e. Profesionalitas.

f. Akuntabilitas.

g. Efisiensi.

h. Efektivitas.

i. keadilan.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan (Asmawi 2014):

a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan

c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut: (Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan terakhir sosial). Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut: (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan). Urusan pilihan adalah sebagai berikut: (kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi) (Kurniawan 2015).

3. Kerangka Fikir

Peranan pemerintah dalam mendukung pengelolaan pertanian hortikultura memerlukan kolaborasi dengan beberapa instansi pemerintahan

agar upaya dalam kegiatan pengelolaan pertanian hortikultura dapat berjalan maksimal. Dalam teori Sedarmayanti (2012) ada tiga aktor yang berperan dalam melaksanakan *collaborative governance* yaitu: pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagan Kerangka Pikir

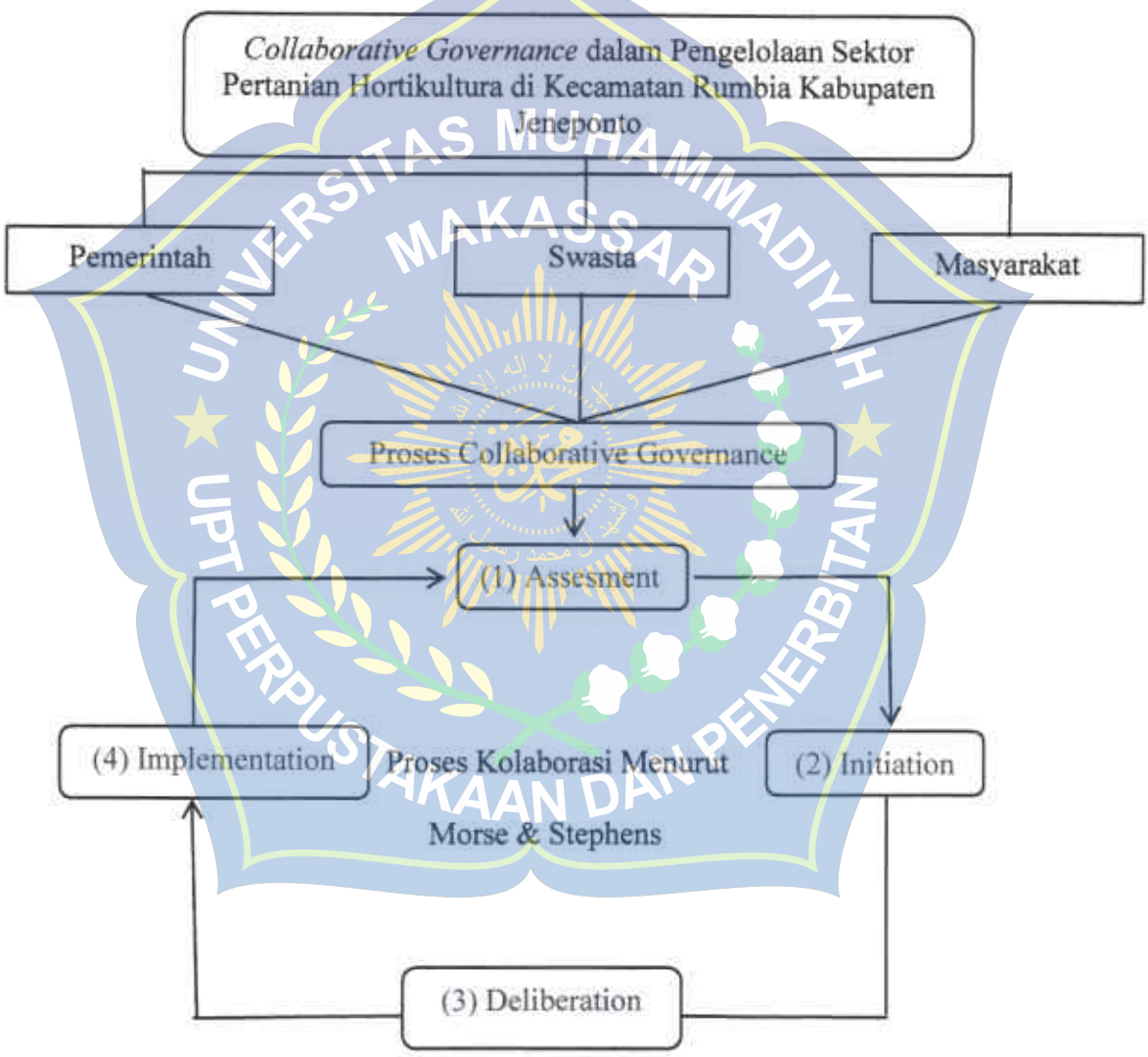

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada Collaborative Governance dengan merujuk pada aktor yang melakukan proses kolaborasi yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat yang melakukan serangkaian proses kolaborasi dalam Pengelolaan Sektor pertanian Holtikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto .

5. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat di bangun defenisi dari setiap indikator variabel sebagai berikut:

a. Pemerintah dapat di tinjau dari 4 indikator yaitu pembuatan regulasi yang berkaitan dengan landasan hukum dalam kegiatan pertanian holtikultura melalui pembentukan perda. Selanjutnya fungsi koordinasi dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk bekerjasama agar kegiatan pengelolaan pertanian holtikultura dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian fungsi transparansi dimana keterbukaan akses informasi dapat menjadi solusi pemecahan masalah dan penetapan program dalam kegiatan pertanian. Dan terakhir akuntabilitas atau bisa diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pertanian holtikultura adalah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui komoditi pertanian.

b. Swasta dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, bantuan teknologi dimana para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan alat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

yang dapat di manfaatkan petani dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya menciptakan lapangan kerja proses manajemen suatu perusahaan membutuhkan karyawan, dimana dengan pendekatan pemberdayaan para pelaku usaha melakukan perekrutan terhadap masyarakat sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan terakhir peningkatan SDM para pelaku usaha yang berasal dari sektor swasta senantiasa meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan sebagai upaya peningkatan kapastitas SDM dalam pengelolaan pertanian.

c. Masyarakat merupakan sasaran kebijakan sehingga keterlibatan masyarakat itu sendiri akan mengarahkan kepada keberhasilan sebuah program. Masyarakat dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: membangun komunikasi dalam menyampaikan segala masalah dan kebutuhan pengelolaan pertanian kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha, masyarakat yang berprofesi sebagai petani ikut terlibat dalam mengkomunikasikan permasalahan mereka pada bidang pertanian. Selanjutnya partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi menjadi sentral sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program-program yang mampu menjawab permasalahan petani dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Dan terakhir pengorganisasian, melalui pembentukan kelompok tani segala permasalahan petani di lembagakan menjadi satu sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk

menjalankan program dan menyalurkan bantuan karena para petani telah terdaftar pada lembaga-lembaga kelompok tani tersebut.

d. Assesment merupakan penilaian yang dilakukan oleh para stakeholder melihat potensi yang dimiliki oleh sektor pertanian Hortikultura Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Penilaian pada proses collaborative governance ini dapat dilihat dengan masing masing stakeholders memahami atas potensi yang dimiliki sektor pertanian di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian yang lebih baik lagi sangat diperlukan kesadaran masing masing stakeholders akan kekurangan masing masing dalam mengelola sektor pertanian hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, sehingga memerlukan "Collaborative *Governance*" dalam pengelolaan sektor pertanian hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

e. Initiation dalam proses collaborative governance inisiasi merupakan tahapan siapa yang menjadi inisiator dalam kolaborasi dan mengidentifikasi pihak mana saja yang berperan dalam kolaborasi sehingga dapat di sepakati bersama. Inisiasi terbangun oleh stakholders dalam mengatasi suatu hambatan yang telah terjadi guna mencapai tujuan yang hasil yang di inginkan More & Stephens (2012). Dalam pengelolaan sektor pertanian hortikultura yang mana dalam pengelolaan memerlukan sinergitas antar pemangku

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kepentingan yang memiliki peran tersendiri dalam pengelolaannya, tahapan inisiasi ini menentukan bahwa ketiga aktor tersebut yang telah memenuhi kebutuhan dalam collaborative governance.

f. Delebration atau atau musyawarah yang dilakukan oleh ketiga actor penting yaitu: pemerintah, swasta, dan masyarakat membahas mengenai fungsi dari masing-masing aktor. Musyawarah yang dilakukan terlihat berjalan dengan baik yang dilakukan secara formal dan non formal oleh ketiga belah pihak.

g. Implementation merupakan penerapan bisa juga diartikan sebagai evaluasi , Implementation ini menunjukan ketiga aktor melakukan perannya dengan baik, pemerintah kabupaten Jeneponto melalui perannya berkaitan dengan pembuatan regulasi, melakukan koordinasi, program yang transparan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program , swasta mempunyai peranan dalam mendukung kegiatan pengelolaan pertanian menjadi salah satu acuan dalam keberhasilan pengelolaan pertanian, dan masyarakat mempunyai peran sentral dalam proses kolaborasi karena masyarakat tidak hanya berlaku sebagai target dan sasaran tetapi menjalankan fungsi dalam pelayanan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam sektor Pertanian Hortikultura memerlukan waktu 2 (dua) bulan pasca seminar pra penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dimana masyarakat disana sangat serius dalam rangka mengembangkan pertanian hortikultura sehingga menarik untuk melihat keterlibatan pemerintah dalam rangka pengelolaannya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Tipe Penelitian

b. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan fenomenologi karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

b. Sumber data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Instansi
1.	Achmad, SP.,M.	AM	Kabid Holtikultura
2.	Andi Bacsran, S.Ap	AB	Kasi Produksi Tanaman Pangan
3.	Dg. Jafar	JF	Toko Tani Bina Sakti
4.	Ahmad	AD	CV. Anjas
5.	Abul Rajab, S.TI	AR	Camat
6.	Sallatu S.P, M.Si	SL	Penyuluh
7.	Ari Suandi S.TP	AS	Penyuluh
8.	Sumarlin	SM	Masyarakat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

9.	Hasan	HN	Masyarakat
10.	Mustakir	MS	Masyarakat
Jumlah Total		10	Informan

(Sumber: Diolah oleh Penulis)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam Peneglolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulansi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi waktu yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Triangulasi sumber

Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Metode Pengumpulan Data

Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulansi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil

uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Dinas Pertanian Jeneponto

Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa tugas dan fungsi diantaranya melakukan penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan di bidang pertanian, memutus kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Selain itu, Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto juga merupakan penjamin kesejahteraan petani melalui program-program asuransi usaha tani padi (AUPT). Adapun pegawai yang bertugas pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto berjumlah 121 orang yang terbagi ke dalam bidang, seksi dan sub bagian. Pegawai tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat eselon, golongan ruang, pendidikan, usia, dan jabatan. (1) Keadaan pegawai berdasarkan tingkat eselon, (2) berdasarkan tingkat golongan ruang, (3) berdasarkan pada tingkat pendidikan , (4) didasarkan pada tingkat usia, (5) didasarkan pada tingkat jabatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto, maka adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

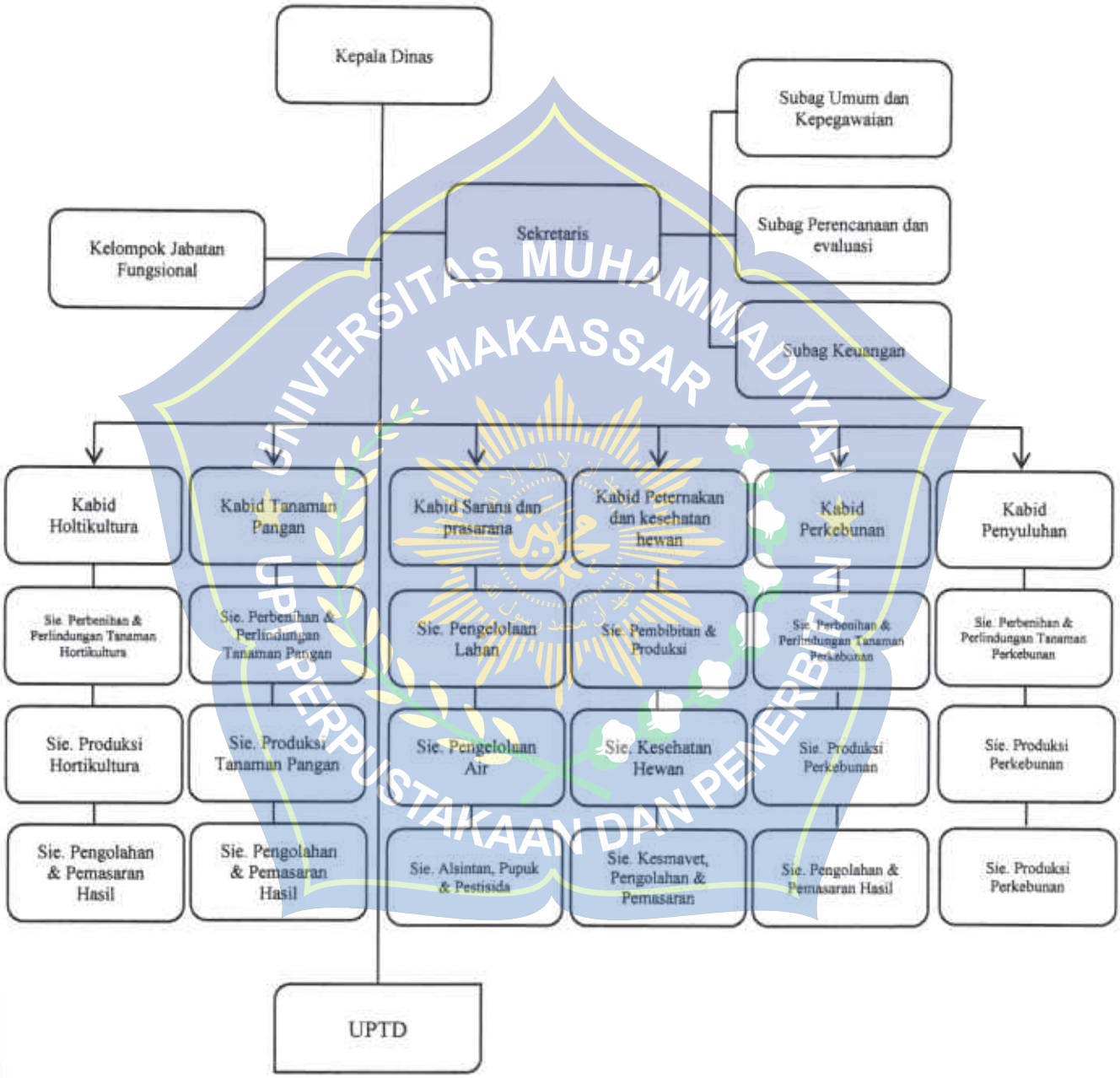

Berdasarkan potensi pertanian yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto menetapkan dan merumuskan beberapa program prioritas, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan peternak melaui beberapa kegiatan, yaitu:

1) Peningkatan kualitas hasil komoditi pertanian melalui pengolahan hasil komoditi pertanian dan ternak

2) Pengembangan promosi hasil produksi pertanian dan peternakan dalam rangka peningkatan akses pasar dan pemasaran.

b. Program peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, yang dilakukan melalui kegiatan:

1) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan persentase 300 % untuk lahan sawah yang beririgasi teknis dan minimal 200% pada lahan sawah tadah hujan dan lahan kering

2) Peningkatan penanganan dan pengendalian organisme penggangu tanaman.

c. Program peningkatan produksi hasil peternakan, melalui kegiatan:

1) Pengembangan ternak yang mempunyai pangspasar luas dan cepat seperti ternak unggas, sapi, kuda dan kambing

2) Pengembangan peternakan terintegrasi dengan sektor lain guna pemanfaatan kotoran ternak untuk mendukung pertanian

3) Penanganan dan pengendalian penyakit dan hewan menular.

d. Program pengembangan otonomi daerah bidang pertanian, melalui kegiatan:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Pengembangan sarana dan prasarana yang mudah dioperasikan petani baik yang pembiayaannya melalui APBN (DAK dan Dekosentrasi) maupun melalui APBD (Provinsi dan Kabupaten)

2) Pengembangan dan pembangunan sarana perbenihan yang mendukung ketersediaan benih unggul dan berlabel yang dibutuhkan oleh masyarakat.

e. Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparat dan petani/peternak, melalui kegiatan:

1) Peningkatan keterampilan petugas dan petani melalui pelatihan, magang, dan studi banding

2) Peningkatan pendidikan aparat pertanian ke jenjang yang lebih tinggi (Diploma, S1 dan seterusnya)

3) Pelatihan petugas dan petani dengan memanfaatkan potensi lokal

4) Pengembangan sistem kerja latihan dan kunjungan dengan memanfaatkan tenaga penyuluh dan tenaga teknis lainnya.

f. Program penyediaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan alat mesin pertanian, yang dapat dilakukan melalui:

1) Penyediaan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), dan Jalan Usaha Tani (JUT).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2) Pembuatan Embung, terutama pada wilayah yang tidak punya jaringan irigasi.

3) Penyediaan *Tractors*, *Hand Tractor*, Mesin Pompa Air, *Hand Sprayer*, *Power Sprayer*, *Power Threser*, *Corn Seller*, dan *Rice Milling*.

4) Potensi Pengembangan Pertanian Kabupaten Jeneponto

Tabel 4.2 Produksi, luas panen, produktivitas dan rata-rata harga produsen tanaman sayur dan buah-buahan semusim Kabupaten Jeneponto 2018

Komoditas	Produksi (Kuwintal)	Luas Panen (Hektar)	Produktivitas (Kuintal/ha)	Rata-rata harga jual petani (Rupiah/KG)
Bawang Merah	22.493	271	831	12.861
Bawang Putih	-	-	-	-
Bawang Daun	1.563	29	54	4.961
Kentang	4.591	42	109	12.668
Kubis	5.965	84	71	6.955
Kembang Kol	-	-	-	-
Petsai/Sawi	2.888	75	39	4.585
Wortel	2.146	32	67	7.468
Lobak	-	-	-	-
Kacang Merah	-	-	-	-
Kacang Panjang	117	14	8	8.177
Cabai Besar	790	121	7	9.243
Cabai Rawit	3.472	623	6	8.083
Paprika	-	-	-	-
Jamur	-	-	-	-
Tomat	255	43	6	5.637
Buncis	116	28	6	6.578
Ketimun	105	17	6	4.721
Labu Siam	101	17	6	5.838
Kangkung	190	32	6	2.523
Bayam	-	-	-	-
Melon	-	-	-	-
Semangka	509	51	10	9.989
Blewah	-	-	-	-
Stroberi	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Pertanian Jeneponto 2018)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jeneponto merupakan salah satu kabupaten penghasil sayuran dan buah-buahan semusim. Tabel 4.2 menunjukkan data luas panen, produksi, hasil per hektar, dan rata-rata harga produsen untuk sayuran semusim di Jeneponto pada tahun 2018. Tahun 2018, lima komoditas sayuran semusim dengan produksi terbesara dalah bawang merah, kentang, kubis, sawi, dan wortel. Produksi bawang merah mencapai 22.493 kuintal, kubis 5.965 kuintal, kentang 4.591 kuintal, cabai rawit 3.472 kuintal dan sawi 2.888 kuintal.

Luas Panen untuk kelima komoditas sayuran dan buah-buahan semusim juga besar dibandingkan dengan komoditas yang lain. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas (kuintal/ha), yaitu bawang merah 83 (kuintal/ha), kentang 109,31 (kuintal/ha), kubis 71,01 (kuintal/ha), bawang daun 53,90 (kuintal/ha), dan sawi 38,51 (kuintal/ha).

2. Kecamatan Rumbia

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah barat dan Kecamatan Kelara di sebelah selatan. Sebanyak 12 Desa merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam. Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke ibukota kecamatan maupun ke ibukota kabupaten berkisar 0-40 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Jenetallasa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

yaitu sekitar 40 km dari ibukota kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Rumbia 23 km dari Bontosunggu. Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan luas wilayah 58,30 km2.

Dari luas wilayah tersebut pada Tada tabel 4.1 nampak bahwa Desa Jenetallasa memiliki wilayah terluas yaitu 7,50 km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Bontotiro yaitu 2,59 km2.

Tabel 4.3 Luas Kecamatan Rumbia Menurut Desa

No.	Desa/Kelurahan	Luas (KM^2)	Persentase
1.	Lebang Manai	4,65	7,98
2.	Rumbia	6,25	10,72
3.	Bonto Manai	6,92	11,87
4.	Bonto Tiro	2,59	7,34
5.	Loka	3,34	5,44
6.	Tompo Bulu	5,39	9,25
7.	Kassi	5,97	10,24
8.	Pallantikang	5,91	10,14
9.	Lebangmanai Utara	3,05	5,23
10.	Bontocini	3,23	5,54
11.	Jenetallasa	7,50	12,86
12.	Ujung Bulu	3,50	6,00
Jumlah		58,30	100,00

(Sumber: BPS Jeneponto 2016)

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Rumbia serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kecamatan Rumbia yang hendak dicapai pada tahun 2018: "Terwujudnya Kecamatan sebagai pendukung utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah ".

Visi Kecamatan Rumbia tersebut mengandung makna filosofis bahwa ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat berada di tingkat kecamatan. Posisi ini, mengidentifikasikan bahwa kecamatan memiiki peran yang sangat strategis, sehingga apapun yang menjadi performance kecamatan merupakan performance kabupaten. Untuk itu penting dipahami bahwa tata kelola pemerintahan dan pelayanan kecamatan yang baik akan menciptakan birokrasi yang profesional, bersih dan berwibawa yang mampu membawa masyarakat yang lebih sejahtera. Pada sisi lain tata pemerintahan dan pelayanan masyarakat kecamatan yang baik akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya trust, tegaknya supremasi hukum, transparansi dalam penyelenggaraan, efektif dan efisien.

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Rumbia menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut :

a. Menwujudkan system penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya.
b. Memberdayakan dan memanfaatkan sarana dan sarana yang ada, didukung dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur secara optimal.
c. Memanfaatkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.
d. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan produk lokal lewat berbagai kegiatan fasilitasi pendidikan.

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Rumbia pada tahun 2015 sekitar 399 jiwa per km2. Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. *Collaborative Governance* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto

Kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian tidak terlepas dari tiga unsur yaitu: Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah senantiasa hadir dalam bentuk regulasi dan kebijakan program yang kemudian bekerjasama dengan sektor swasta yang hadir dengan bantuan sumber daya berupa modal serta kehadiran masyarakat bukan lagi sebagai target dan sasaran sebuah program tetapi masyarakat juga sebagai pelaksana dan pengawasan dalam sebuah program.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pengelolaan sektor pertanian hortikultura di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari kolaborasi antara pihak pemerintah Kabupaten Jenenponto, Sektor swasta dan juga masyarakat yang akan penulis bahas dalam pemaparan sebagai berikut:

a. Pemerintah

Pemerintah merupakan aspek terpenting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pembuatan program. Dalam pelaksanaan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung program pertanian hortikultura di Kabupaten Jeneponto dapat diukur melalui peran pemerintah berkaitan dengan pembuatan regulasi, melakukan koordinasi, program yang transparan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program yang akan penulis bahas sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

penduduk tertinggi adalah di Desa Bontotiro yaitu 742 jiwa per km2, menyusul. Desa Ujungbulu sekitar 609 jiwa per km2, dan Desa Loka sekitar 593 jiwa perkm2. Selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah di Desa Jenetallasa sekitar 214 jiwa per km2. Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 4.592 orang adalah petani pangan, sedangkan peternak sebanyak 1.903 orang. Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 755 orang, Industri 367 orang, Angkutan 491 orang, dan Jasa hanya 362 orang. Adapun penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 234 orang.

Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Rumbia menurut Desa/Kelurahan

Tahun 2014-2016

No.	Desa/Kelurahan	2014	2015	2016
1.	Lebang Manai	2.369	2.373	2.378
2.	Rumbia	3.061	3.066	3.073
3.	Bonto Manai	2.061	2.064	2.069
4.	Bonto Tiro	1.914	1.918	1.921
5.	Loka	1.975	1.978	1.982
6.	Tompo Bulu	1.676	1.679	1.689
7.	Kassi	2.328	2.332	2.337
8.	Pallantikang	1.759	1.763	1.766
9.	Lebang mania Utara	1.259	1.262	1.264
10.	Bontocini	1.068	1.070	1.072
11.	Jenetallasa	1.601	1.603	1.607
12.	Ujung Bulu	2.122	2.126	2.130

(Sumber: Data Statistik 2016)

Berdasarkan dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 23.193, pada tahun 2015 23.234 dan pada tahun 2016 sebesar 23.282 dengan kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Membuat Regulasi

Regulasi merupakan aturan yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Di era otonomi daerah seperti sekaran ini pemerintah daerah di berikan tanggung jawab agar lebih mandiri dalam mengurus daerahnya masing-masing sehingga pemerintah senantiasa dituntut agar lebih beperan aktif dalam menciptakan regulasi demi kesejahteraan masyarakat.

Pertanian hortikultura di Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu sektor andalan yang selalu di kembangkan kearah yang lebih baik. Program pengembangan pertanian hortikultura selalu masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Melalui beberapa program yang di tawarkan kepada masyarakat khusunya petani di harapkan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani.

> "Guna mendukung petani dalam program pertanian hortikultura di Kecamatan Rumbia dinas pertanian telah membuat beberapa program yang masuk dalam rencana kerja. Salah satunya program bantuan mesin pertanian yang dapat memudahkan petani dalam kegiatan pengelolaan pertanian mereka. Kebanyakan seperti traktor agar petani mudah dalam mengelola lahan milik mereka." (Wawancara dengan AB Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dalam mendukung program pengembangan pertanian hortikultura di Kabupaten Jeneponto melalui dinas pertanian berupaya untuk menciptakan program dalam rangka mendukung pertanian masyarakat. Salah satunya bantuan alat atau mesin pertanian dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan pertanian.

Regulasi merupakan sebuah bentuk aturan tentang tata kelola dan peraturan yang menjadi landasan dalam pengelolaan pertanian. Aturan terkait mekanisme pengelolaan pertanian sampai kepada batasan-batasan dari seluruh stakeholder yang terlibat dapat dimuat dalam regulasi yang telah di tetapkan pemerintah.

> "Industri pertanian merupakan salah satu target yang memang menjadi salah satu komoditi ekonomi bagi masyarakat. Dalam pengelolaan pertanian tentu harus di ikuti oleh regulasi atau aturan demi kelancaran kegiatan pertanian. Regulasi tersebut bisa berbentuk undang-undang, peraturan menteri pertanian atau untuk di Jeneponto masuk dalam peraturan daerah. Didalam regulasi semua di atur mulai apa peranan pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri." (Wawancara dengan AM Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa regulasi dalam pelaksanaan tata kelola pertanian di Jeneponto berlandaskan dengan peraturan daerah yang mengatur fungsi pemerintah. Swasta dan masyarakat dalam kegiatan pertanian.

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui perintah Undang-Undang, sehingga terdapat sinergitas yang terpadu, bertahap dan berkelanjutan tergantung pada visi dan misi masing-masing pemerintah daerah yang dituangkan di dalam rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Segala bentuk kegiatan pertanian masyarakat di kelola pemerintah melalui sebuah regulasi yang salah satunya mengatur terkait daya beli konsumen dalam hal ini petani terkait kebutuhan-kebutuhan dalam mendukung kegiatan pertaniannya.

> "Pemerintah harus hadir dalam fungsinya melayani masyarakat, termasuk kegiatan pertanian. Untuk itu ada standar dalam pelaksanaan pelayanan, termasuk dari segi aturan pemerintah. Hadirnya regulasi untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat umum yang rentan di diskriminasi oleh oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan semata. Pemerintah juga hadir untuk menjaga ketersediaan pupuk dan harga subsidi, itu semua melalui regulasi yang telah di atur oleh pemerintah daerah." (Wawancara dengan AR Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kehadiran pemerintah dalam melaksanakan otoritas pelayanan di bidang pertanian melalui regulasi pada dasarnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar dapat memperoleh seluruh kebutuhan dalam kegiatan pertanian.

2. Melakukan Koordinasi

Koordinasi merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan bersama yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut.Sedangkan Brech, memberikan pengertian koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Dalam mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto, Dinas pertanian mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi

yang memiliki kepentingan dalam menyukseskan kegiatan pertanian berbasis masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Bentuk koodinasi tersebut untuk kelancaran kegiatan pertanian.

> "Ada beberapa bentuk koordinasi yang kami lakukan, baik dengan provinsi ataupun pemerintah pusat terkait pelayanan pertanian. Untuk tingkat daerah ada beberapa lembaga yang di bentuk untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan pertanian kepada masyarakat. Seperti KPPP yang memiliki fungsi pengawasan penyebaran pupuk di Kabupaten Jeneponto. Tentu untuk mengetahui tingkat penyebaran pupuk pemerintah harus senantiasa berkoordinasi dengan PKKK ataupun penyuluh pertanian dilapangan." (Wawancara dengan AB Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pertanian pemerintah daerah senantiasa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait pengawasan pertanian guna mengawasi penyebaran pupuk di Kabupaten Jeneponto.

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Penyelenggaraan kegiatan pertanian di Jeneponto dapat terselenggara secara maksimal jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait yang mendukung kegiatan pelayanan pertanian. Koordinasi juga bisa di bilang bagian dari kerjasama, sehingga dalam pelaksanaannya perlu ada komunikasi yang baik dalam mendukung upaya penyelenggaraan pertanian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> "Keterlibatan kami dalam pelaksanaan pertanian di Kabupaten Jeneponto hanya sebagai penyuluh yang kemudian menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait apa yang menjadi masalah dalam kegiatan pertanian di Jeneponto sehingga pemerintah daerah bisa mencari solusi pemecahannya. Seperti kebanyakan masyarakat belum mengetahui teknik pertanian hooltikultura ataupun teknik penggunaan pupuk, disitulah peran kami untuk memberikan penyuluhan. (Wawancara dengan SL Tanggal 15/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa salah satu bentuk pemanfaatan koordinasi terkait pengelolaan pertanian holtikultura di Kabupaten Jeneponto melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar kegiatan pertanian dapat berjalan maksimal.

Koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerja sama di dalam kelompok untuk tujuan bersama dan didukung oleh adanya konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu yang bekerjasama sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi.

Kehadiran pemerintah daerah guna memastikan keberlangsungan kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto juga memiliki fungsi melembagakan kegiatan pertanian masyarakat melalui kelompok tani yang di bentuk untuk memudahkan pemerintah melaksanakan koordinasi terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam bidang pengelolaan pertanian.

> "Kelompok tani memiliki fungsi untuk membangun kerjasama dengan pemerintah guna melihat permasalahan pertanian dan memberikan solusi pemecahan. Seperti misalnya hasil produksi petani

membutuhkan sentuhan pemerintah agar menyediakan produsen yang siap membeli hasil pertanian masyarakat. Selain itu kami juga berfungsi melakukan pendataan terkait berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertanian." (Wawancara dengan AS Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kehadiran masyarakat yang berkegiatan sebagai petani bergerak dalam membentuk kelembagaan agar memudahkan bentuk koordinasi dengan pemerintah terkait masalah dan kebutuhan pertanian masyarakat. Tentu melalui bentuk seperti itu dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mengelola kegiatan pertanian secara efektif dan efisien.

3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Prinsip keterbukaan merupakan sesuatu yang harus diterapkan oleh setiap pelayanan publik, termasuk dalam rangka pengelolaan pertanian holtikultura. Penyampaian informasi kepada seluruh stake holder yang berkepntingan berfungsi untuk terlibat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada yang keluar dari aspek pelayanan umum.

"Menjalankan pelaksanaan pelayanan publik secara transparan itu sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah yang sudah di atur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan bidang pelayanan terkait pertanian pemerintah senantiasa terbuka kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan informasi terkait pelaksanaan pertanian holtikultura. Seperti berapa anggaran yang digunakan, apa acuan program, sampai kepada harga kebutuhan masyarakat seperti pupuk

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ketersediaan lapangan kerja menjadi masalah yang bukan hanya terjadi di Kabupaten Jeneponto tetapi juga di daerah lain. Kehadiran para pelaku usaha dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sehingga memaksimalkan pemberdayaan masyarakat perlu di lakukan agar memberikan keuntungan bagi semua pihak.

> "Pemerintah Kecamatan memang senantiasa mendorong kepada para pelaku usaha jika ingi merekrut tenaga kerja jangan dari luar, upayakan orang di sekitar tempat usaha tersebut. Apa lagi jika pelaku usaha tersebut orang Jeneponto sendiri. Ini memang menjadi perhatian pemerintah, karena kehadiran pemerintah bukan hanya menjawab masalah di bidang pertanian, tetapi juga terkait permasalahan tenaga kerja." (Wawancara dengan AR Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah mendorong para pelaku usaha agar dapat memberdayakan masyarakat di sekitar usaha untuk di berdayakan melalui penyediaan lapangan kerja di sebuah sektor usaha.

3. Peningkatan SDM

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia (cipta, rasa, dan karsa) sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan memelihara tena ga kerja secara efektif dan efisien.

Pengelolaan pertanian akan lebih maksimal jika para petani memahami tekhnik peneglolaan lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Kegagalan panen selain faktor lainnya juga di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga tanaman

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

itu bisa di akses oleh masyarakat." (Wawancara dengan AM Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dengan memudahkan akses seluruh pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pertanian holtikultura di Kabupaten Jeneponto.

Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.

Transparansi didasari atas kemudahan pemberian informasi antara pihak yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pertanian holtikultura. Kemudahan informasi menjadi salah satu kemudahan dalam bentuk komunikasi agar kerjasama dalam pembangunan kegiatan pertanian dapat berjalan maksimal.

"Keterbukaan informasi dari pemerintah itu sangat penting dalam pola kerjasama yang dilakukan antara pihak swasta dan pemerintah itu sendiri. Pemberian arus informasi akan memudahkan kerjasama berkaitan dengan proses pelaksanaan di lapangan. Pihak swasta terkadang membutuhkan informasi terkait jumlah lahan, jumlah petani, apa yang ditanam petani itu semua harus di ketahui oleh pihak swasta. Sehingga memudahkan kami dalam menyusun program pembenahan infrastruktur." (Wawancara dengan AD Tanggal 16/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan pertanian perlu mendapatkan informasi terkait proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai penopang kegiatan pertanian. Dengan informasi tersebut sasaran dan target

pelaksanaan program yang di tetapkan dapat disusun dan dilaksanakan secara maksimal.

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Keterbukaan informasi juga mempengaruhi kegiatan pertanian dari masyarakat. Terlebih terkait harga pupuk yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Adanya informasi terkait harga tersebut menjadikan masyarakat dapat turut mengawasi kegiatan penyaluran pupuk di lapangan.

> "Pemerintah tentu harus transparan dalam pelayanannya kepada masyarakat, seperti kebutuhan akan pupuk, berapa harganya dan siapa yang bertugas untuk menyalurkannya tentu kita masyarakat petani harus mengetahui semua itu. Karena masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menjual harga pupuk bersubsidi di atas harga yang sudah di tetapkan pemerintah." (Wawancara dengan HN Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi terkait harga pupuk dari pemerintah terhadap masyarakat, menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat untuk menindaki oknum-oknum yang menyalurkan pupuk dengan harga di atas penjualan pemerintah. Dengan demikian kehadiran masyarakat bukan hanya sebagai target dan sasaran program tetapi juga dapat terlibat langsung dari kegiatan pengawasan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan kegiatan pertanian Holtikultura di Kabupaten Jeneponto. Mulai dari perencanaan program, pelaksanaan sampai kepada evaluasi kegiatan pengelolaan pertanian pemerintah harus terlibat didalamnya. Melalui pemberian solusi atas segala bentu permasalahan masyarakat di bidang pertanian.

> "Seluruh pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Jeneponto itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pembuatan regulasi, penyusunan program serta langkah-langkah untuk menjawab semua keluhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan solusi kepada masyarakat terkait kegiatan pertanian seperti penyediaan teknologi pengelolaan kegiatan pertanian, menjaga ketersediaan pupuk, meningkatkan keterampilan masyarakat sampai kepada proses produksi pemerintah hadir untuk bertanggung jawab." (Wawancara dengan AB Tanggal 14/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa serangkaian proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan pertanian di Kabupaten Jeneponto merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah sehingga kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola

sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodic.

Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pertanian holtikultura adalah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui komoditi pertanian. Tanggung jawab tersebut menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

> "Kehadiran pemerintah dalam tata kelola pelayanan publik memang harus di maksimalkan di tengah kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat khusunya bidang pertanian. Seperti yang kita ketahui bersama ada banyak masalah terkait pertanian ketersediaan pupuk, ketersediaan lahan sampai kepada ketersediaan bibit itu hanya sedikit contoh kecil dari permasalahan petani. Dan disana pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut." (Wawancara dengan AS Tanggal 15/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pertanian merupakan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan kegiatan pertanian yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dapat berjalan efektif.

Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru.

Fungsi akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan pertanian di Kabupaten Jeneponto harus di dukung oleh ketersediaan

sumber daya yang dibutuhkan demi meningkatkan produksi di bidang pertanian. Salah satunya penyediaan teknologi pertanian yang tidak bisa di bebankan kepada masyarakat karena keterbatasan masyarakat itu sendiri.

> "Penyediaan alat teknologi dalam kegiatan pertanian merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto, yang tidak boleh di bebankan kepada masyarakat. Kurangnya teknologi menjadi penghambat kegiatan pertanian masyarakat yang benar-benar harus di perhatikan oleh pemerintah. (Wawancara dengan MS Tanggal 17/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa penyediaan teknologi pertanian merupakan tanggung jawab pemerintah dalam kegiatan pengelolaan pertanian holtikultura. Petani menganggap bahwa permasalahan yang menjadi penghambat produksi pertanian karena kurangnya pemanfaatan teknologi oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait aspek pemerintah dalam proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dapat di tinjau dari 4 indikator yaitu pembuatan regulasi yang berkaitan dengan landasan hukum dalam kegiatan pertanian holtikultura melalui pembentukan perda. Selanjutnya fungsi koordinasi dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk bekerjasama agar kegiatan pengelolaan pertanian holtikultura dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian fungsi transparansi dimana keterbukaan akses informasi dapat menjadi solusi pemecahan masalah dan penetapan program dalam kegiatan pertanian dan terakhir akuntabilitas atau bisa diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dengan pertanian holtikultura adalah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui komoditi pertanian.

b. Swasta

Peranan swasta dalam mendukung kegiatan pengelolaan pertanian menjadi salah satu acuan dalam keberhasilan pengelolaan pertanian. Adanya perusahaan penyedia jasa seperti sarana dan prasarana pertanian, penyediaan bibit dan obat-obatan yang digunakan dalam pertanian memudahkan masyarakat petani dalam mengelola produksi pertaniannya. Pemerintah Kabupaten Jeneponto bekerjasama dengan beberapa sektor private dalam kegiatan pengelolaan pertanian, melalui bentuk perjanjian kerjasama dan hubungan timbal balik di harapkan dapat membangun industry pertanian di Jeneponto.

Pada pembahasan kali ini penulis akan membahas keterlibatan swasta dalam rangka mendukung pengelolaan pertanian di Kabupaten Jeneponto dengan pendekatan indikator bantuan teknologi, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan SDM dalam upayanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pertanian.

1. Bantuan Teknologi

Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tidak hanya membantu bekerja dan melakukan tugas-tugas yang berkecimpung dalam dunia komputer saja, tetapi telah berkembang dalam bidang lainnya, seperti sains, perbankan, perpustakaan, teknik dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Teknologi merupakan sarana pendukung dalam kegiatan pertanian. Proses produksi masyarakat yang berprofesi sebagai petani jauh lebih efisien dan efektif jika di dukung oleh alat pertanian. Sehingga dalam perjanjian kerja antara pemerintah dan pihak swasta perlu di dorong pengembangan alat-alat pertanian holtikultura.

> "Tentu keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertanian harus di topang dengan sumber daya seperti teknologi sebagai hubungan timbal balik atas dasar perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Jadi, pihak swasta tidak hanya mencari keuntungan dari daerah ini, tetapi juga perlu berkontribusi nyata dalam prospek pembangunan pertanian melalui bantuan teknologi." (Wawancara dengan AM Tanggal 14/09/2020)

Hasil penelitian dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta menekankan kepada penyediaan bantuan teknologi dari proses kerjasama yang terjadi.

Secara lengkap dari aspek ranah keilmuan, teknologi pertanian dapat diuraikan sebagai suatu penerapan prinsip-prinsip matematika dan sains alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumberdaya pertanian dan sumberdaya alam untuk kepentingan kesejahteraan manusia.

Sarana dan prasarana pendukung seperti alat penanam, alat pengering sampai kepada alat pengelolaan tanaman menjadi suatu keharusan bagi pihak swasta untuk di berikan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab sebagai langkah pemberdayaan masyarakat.

> "Keterlibatan perusahaan kami dalam rangka mencari keuntungan pada kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto harus di dukung dengan bantuan teknologi sebagai langkah pemberdayaan bagi masyarakat khususnya petani. Itu merupakan sebuah program CSR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> yang memang menjadi tanggung jawab dari perusahaan untuk memberikan bantuan. Jadi seperti balasan jasa karena masyarakat mau bekerjasama dengan perusahaan, timbal baliknya kami menyediakan alat pertanian." (Wawancara dengan JF Tanggal 16/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan adanya hubungan kerjasama yang baik antara petani dengan pihak swasta selaku penyedia jasa, para pelaku usaha memberikan bantuan alat teknologi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang tertuang dalam undang-undang.

Teknologi pertanian yang aksiologisnya pada kegiatan penyiapan sumberdaya (lahan untuk penanaman, kolam), budidaya, pemeliharaan sampai pemanenan, Pilahan kedua, berfokus pada teknologi untuk penanganan, pengolahan, dan pengamanan hasil. Kelompok ketiga merupakan teknologi untuk kegiatan transportasi dan pemasaran hasil pertanian.

Ketersediaan alat dalam menopang kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun dalam pelaksanaannya ketersediaan alat masih sangat kurang sehingga baik pemerintah daerah maupun sektor swasta lebih intens dalam penyediaan alat teknologi pendukung pertanian.

> "Adanya bantuan alat baik dari pemerintah dan swasta sangat memudahkan para petani dalam kegiatan pengelolaan pertanian. Tentu dengan bantuan tersebut menjadi proses produksi jauh lebih cepat. Tetapi jumlah alat pertanian tersebut masih kurang, kami mengharapkan kepada pemerintah dan pengusaha agar lebih meningkatkan bantuan peralatan seperti itu." (Wawancara dengan SM Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dengan adanya bantuan alat teknologi dalam mendukung kegiatan pengelolaan pertanian di

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jeneponto sangat membantu kaum petani. Sehingga untuk lebih memaksimalkan produksi pertanian masyarakat mengharapkan adanya penambahan bantuan alat pertanian.

2. Menciptakan Lapangan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada.

Proses produksi sebuah perusahaan juga membutuhkan kelembagaan dalam rangka pengelolaan perusahaan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya para perusahaan sektor swasta membutuhkan tenaga yang dapat di lakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan demikian kehadiran sektor swasta dapat memberikan peningkatan taraf kehidupan bagi masyarakat di luar profesi petani.

> "Adanya sektor-sektor industry yang tumbuh berkembang di Kabupaten Jeneponto sebagai penyedia jasa dan segala kebutuhan petani, tentu memerlukan proses manajemen dalam pengelolaan usaha mereka. Di Kabupaten Jeneponto ada sekitar dua puluh lima jenis uasaha yang rata-rata mempekerjakan tenaga lokal sebanyak 4-5 orang. Tentu itu merupakan peluang usaha yang dapat mengurangi pengangguran." (Wawancara dengan AB Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa adanya berbagai jenis usaha dalam mendukung kegiatan pengelolaan pertanian mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Dengan demikian kehadiran para pelaku usaha tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Jeneponto.

Permintaan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang akan membeli barang atau jasa karena barang tersebut memberikan kegunaan kepada pembeli. Namun bagi pengusaha, mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen.

Ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Jeneponto menjadi bertambah dengan adanya para pelaku usaha yang melakukan perekrutan masyarakat untuk membantu manajemen dari berbagai jenis usaha. Pembukaan lapangan kerja menjadi penunjang sebagai langkah proses pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.

> "Tentu kami melibatkan tenaga lokal dengan melakukan perekrutan tenaga kerja, selain itu merupakan tuntutan dari pemerintah serta masyarakat itu sendiri juga sebagai aturan yang sudah di buat dan ditujukan bagi para pelaku usaha. Jadi kehadiran sektor usaha selain dapat membantu petani dalam pengelolaan pertanian mereka juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha itu sendiri." (Wawancara dengan AD Tanggal 16/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya para pelaku usaha dalam mebuka penyediaan jasa bagi kebutuhan pengelolaan pertanian di Jeneponto dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar agar dapat di berdayakan demi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diproduksinya. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan.

Ketersediaan lapangan kerja menjadi masalah yang bukan hanya terjadi di Kabupaten Jeneponto tetapi juga di daerah lain. Kehadiran para pelaku usaha dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sehingga memaksimalkan pemberdayaan masyarakat perlu di lakukan agar memberikan keuntungan bagi semua pihak.

> "Pemerintah Kecamatan memang senantiasa mendorong kepada para pelaku usaha jika ingi merekrut tenaga kerja jangan dari luar, upayakan orang di sekitar tempat usaha tersebut. Apa lagi jika pelaku usaha tersebut orang Jeneponto sendiri. Ini memang menjadi perhatian pemerintah, karena kehadiran pemerintah bukan hanya menjawab masalah di bidang pertanian, tetapi juga terkait permasalahan tenaga kerja." (Wawancara dengan AR Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah mendorong para pelaku usaha agar dapat memberdayakan masyarakat di sekitar usaha untuk di berdayakan melalui penyediaan lapangan kerja di sebuah sektor usaha.

3. Peningkatan SDM

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur unsur manusia (cipta, rasa, dan karsa) sebagai aset suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan memelihara tena ga kerja secara efektif dan efisien.

Pengelolaan pertanian akan lebih maksimal jika para petani memahami tekhnik peneglolaan lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Kegagalan panen selain faktor lainnya juga di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga tanaman

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sehingga menyebabkan tanaman terserang hama yang berdampak terhadap hasil produksi pertanian itu sendiri.

> "Dalam mendukung upaya pengelolaan masyarakat untuk kegiatan pertanian, pihak pemerintah selalu bekerjasama dengan instansi swasta seperti penyuluh pertanian dari suatu lembaga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan pengelolaan pertanian. Pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam menghadapi hama yang kemudian berdampak kepada hasil produksi pertanian perlu ditingkatkan, sehingga kedepan masyarakat benar-benar memahami tata cara yang benar dalam pengelolaan kegiatan pertanian." (Wawancara dengan AR Tanggal 14/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan, kurangnya pemahaman dari petani dalam menghadapi hama yang dapat menyerang tanaman berakibat kepada kurangnya hasil produksi sampai kepada gagal panen akibat hal tersebut.

Merupakan tugas manajemen Sumber Daya Manusia untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan Sumber Daya Manusia yang merasa puas dan memuaskan. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada Sumber Daya Manusia.

Penyuluh swasta pada dasarnya hadir kepada masyarakat petani dalam peningkatan SDM masyarakat terkait pengelolaan pertanian. Kegiatan tersebut juga di manfaatkan untuk sosialisasi terkait produk yang mampu membantu petani dalam kegiatan pengelolaan pertanian. Hal ini tentu menjadi masukan dan pengetahuan baru bagi petani.

> "Penyuluh pada dasarnya tidak hanya berasal dari pemerintah juga ada dari pihak swasta, biasanya perusahaan yang bergerak pada kegiatan pertanian adalah pelaku usaha seperti kami yang menjual plestisida dan segala kebutuhan obat-obatan dalam pengelolaan pertanian.Tentu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

selain melakukan kegiatan penyuluhan juga sebagai kegiatan memperkenalkan produk kepada petani." (Wawancara dengan AD Tanggal 16/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam upayanya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan pengelolaan pertanian, pihak swasta melakukan kegiatan penyuluhan dan sebagai timbal balik para pelaku usaha juga memperkenalkan produk yang mereka produksi.

Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah fungsi pengawasan, yaitu mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi penyimpangan atau, kalau perlu, menyesuaikan kembali rencana yang dibuat. Dengan demikian pengawasan adalah fungsi manajemen yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana sumber daya manusia, yang dirumuskan sebagai dasar analisa dari tujuan organisasi yang fundamental.

Inovasi dalam bidang pertanian secara sepenuhnya belum dipahami oleh masyarakat, mulai dari ketersediaan alat, penerapan ilmu pertanian, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan dengan memperkenalkan sarana dan prasarana pendukung yang bisa menjadi masukan bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengelolaannya.

"Hampir setiap bulan selalui ada penyuluhan baik dari pihak pemerintah atau swasta, kalau swasta biasanya mereka membawa brosur dan produk seperti plestisida yang dikenalkan kepada masyarakat. Ada banyak hal-hal baru yang kami ketahui terkait pengelolaan pertanian, sampai kepada bagaimana proses mempercepat hasil produksi itu juga di berikan kepada kami, saya fikir itu penting

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dalam keberlangsungan kegiatan pertanian di Jeneponto." (Wawancara dengan HN Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam upayanya memasarkan produk pertanian oleh para pelaku usaha juga di barengi kegiatan penyuluhan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk metode pengelolaan pertanian.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait sektor swasta dalam proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, bantuan teknologi dimana para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan alat yang dapat di manfaatkan petani dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya menciptakan lapangan kerja proses manajemen suatu perusahaan membutuhkan karyawan, dimana dengan pendekatan pemberdayaan para pelaku usaha melakukan perekrutan terhadap masyarakat sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan terakhir peningkatan SDM para pelaku usaha yang berasal dari sektor swasta senantiasa meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan sebagai upaya peningkatan kapastitas SDM dalam pengelolaan pertanian.

c. Masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa melibatkan masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai kepada proses pengawasan. Hal tersebut di pertegas melalui hubungan kolaborasi utamanya pada kegiatan peningkatan hasil pertanian sebagai upaya agar

masyarakat benar-benar berdaya dalam peningkatan perekonomian. Masyarakat mempunyai peran sentral dalam proses kolaborasi karena masyarakat tidak hanya berlaku sebagai target dan sasaran tetapi menjalankan fungsi dalam pelayanan.

Dalam pembahasan selanjutnya dapat dipaparkan peran masyarakat dalam proses kolaborasi dengan menggunakan pendekatan tiga indikator yang mendukung proses kolaborasi yaitu, membangun komunikasi, partisipasi dan pengorganisasian yang di paparkan sebagai berikut:

1. Membangun Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat dari adanya hubungan social. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Pelayanan terkait pengelolaan pertanian akan lebih efektif dan efisien jika masyarakat senantiasa menyampaikan segala persoalan kepada pemerintah sebagai bentuk komunikasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bentuk komunikasi tersebut dapat berupa masukan, penyampaian masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian.

> "Masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pelaksanaan pelayanan public sehingga harapan adanya bentuk penyampaian dari masyarakat terkait pengelolaan pertanian menjadi dasar dalam pembuatan program yang akan dilaksanakan pemerintah. Berkaitan dengan itu kebanyakan komunikasi yang banyak dari masyarakat adalah kurangnya bantuan teknologi dan obat pembunuh hama, atas dasar

tersebut pemerintah kemudian merancang bentuk kerjasama baik dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar mampu memaksimalkan kebutuhan dari masyarakat." (Wawancara dengan AM Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi dari masyarakat dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program dalam peningkatan produksi pertanian dengan memenuhi segala kebutuhan masyarakat di bidang pertanian.

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah yaitu dimana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan.

Petani sebagai target dari pemberdayaan dalam peningkatan hasil produksi di bidang pertanian harus senantiasa membangun komunikasi dengan instansi-instansi terkait. Sehingga kegiatan pertanian tidak menjadi terhambat. Komunikasi tersebut bisa berbentuk pribadi ataupun melalui organisasi seperti kelompok tani.

"Pengelolaan pertanian tentu tidak selalu berjalan mulus, pasti ada persoalan didalamnya. Permasalahan tersebut tentu lebih banyak di ketahu oleh petani, terkait apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka itu di ketahui oleh petani, karena mereka pelaku dalam kegiatan pengelolaan pertanian. Disitulah fungsi masyarakat untuk membangun komunikasi dengan semua yang berkepentingan agar segera di carikan solusi baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta.' (Wawancara dengan SL Tanggal 15/09/2020).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada instansi terkait demi kelancaran kegiatan pengelolaan pertanian di Kabupaten Jeneponto.

Komunikasi adalah peristiwa penyampaian ide manusia. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media tertentu.

Pentingnya komunikasi bagi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pertanian holtikultura sebagai proses penentu kebijakan dalam rangka pelayanan dalam bidang pertanian. Kebutuhan petani yang semakin kompleks menjadi acuan bagi masyarakat untuk senantiasa membangun komunikasi dengan instansi penyedia jasa layanan.

> "Kami senantiasa membangun komunikasi dengan pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hal yang paling banyak kami sampaikan adalah seperti ketersediaan pupuk dan bantuan alat pertanian. Namun sejauh ini pemerintah belum mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan petani tersebut. Padahal apa yang menjadi tuntutan dari petani senantiasa di komunikasikan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan." (Wawancara dengan MS Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pertanian membutuhkan komunikasi yang intens dari para petani agar segala kebutuhan dalam rangka pengelolaan pertanian dapat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

segera di penuhi oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jeneponto.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat yang digunakan secara umum dan luas. Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi memang terkait erat dengan gagasan ham.

Upaya peningkatan produktivitas masyarakat Kabupaten Jeneponto melalui kegiatan pertanian Holtikultura dapat tercapai dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat dalam upaya perencanaan, pengelolaan dan tahap evaluasi. Dengan demikian terjadi sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kegiatan pertanian.

> "Tentu program yang berkaitan dengan bidang pertanian membutuhkan partisipasi langsung dari petani itu sendiri. Karena mereka yang mengetahui pasti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Disetiap pertemuan membahas tentang pengelolaan pertanian kita senantiasa mengundang para masyarakat melalui kelompok tani, agar program pemerintah berjalan dengan kebutuhan masyarakat." (Wawancara dengan AB Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pemerintah daerah senantiasa membuka forum diskusi dengan masyarakat terkait pengelolaan kegiatan pertanian. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah lokal melihat partisipasi sebagai hal yang

perlu, tetapi berpotensi menjadi penghambat terhadap agendanya, seperti sesuatu yang harus dibayar dengan janji belaka pekerja masyarakat melihatnya sebagai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi

Keterlibatan masyarakat dalam langkah menyusun program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas petani, merupakan bentuk partisipasi petani agar kegiatan-kegiatan yang menjadi acuan pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas petani dapat berjalan dengan baik.

> "Setiap kami melakukan kegiatan penyuluhan terkait upaya untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam rangka mengelola pertanian yang baik selalu di hadiri oleh masyarakat. Tentu hal tersebut menjadi acuan keberhasilan kegiatan pertanian sebagai respon dalam bentuk partisipasi. Terkadang kita juga menemukan beberapa petani yang masih memiliki ego dengan menggunakan metode pertanian lama, sehingga tidak mau mengindahkan apa yang menjadi arahan dari penyuluh yang ada. Jadi memang perlu ada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk lebih berkembang dalam pengelolaan pertanian." (Wawancara dengan AS Tanggal 15/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan perlu di dukung dengan upaya partisipasi dari petani itu sendiri agar semua bentuk program terkait pertanian holtikultura dapat di jalankan sesuai dengan metode yang benar sesuai dengan arahan dari penyuluh.

Kondisi terakhir bagi partisipasi adalah bahwa struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. Prosedurprosedur pertemuan tradisional, dan teknik pembuatan keputusan sering bersifat mengucilkan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang tidak bisa berpikir cepat, tidak ingin menginterupsi, kurang percaya diri atau tidak memiliki kemahiran berbicara.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Masyarakat Kecamatan Rumbia menyoroti lambannya upaya dari pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam merealisasikan semua kebutuhan terkait kegiatan pertanian. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa kegiatan partisipasi tidak memiliki fungsi yang semestinya.

> "Masyarakat selalu menghadiri pertemuan yang membahas tentang pengelolaan pertanian berdsarkan program yang dijalankan oleh pemerintah. Namun kami berfikir apa yang menjadi masukan kami hanya sekedar konsep yang tak kunjung di realisasikan. Persoalan tersebut membuat masyarakat menjadi tidak lagi bersemangat jika ada pertemuan yang di inisiasi oleh pemerintah, karena cenderung hanya jalan di tempat." (Wawancara dengan HN Tanggal 17/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan masyarakat cenderung pasif dalam berpartisipasi akibat dari kekecewaan mereka terhadap pemerintah Kabupaten Jeneponto yang lamban merespon segala kebutuhan masyarakat dalam rangka kegiatan pengelolaan pertanian Holtikultura di Kecamatan Rumbia.

3. Pengorganisasian

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Upaya keterlibatan masyarakat dalam rangka pengelolaan pertanian di dukung melalui kelembagaan yang terbentuk sebagai upaya mendorong keterwakilan atas kebutuhan dari kelompok petani. Lembaga kelompok tani

juga memudahkan pemerintah dalam merealisasikan penyebaran pupuk bagi petani di Kabupaten Jeneponto.

> "Salah satu upaya masyarakat dalam keterlibatannya mendukung progres kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto melalui pembentukan kelompok tani yang di inisiasi oleh petani itu sendiri, dimana kelembagaan tersebut menampung seluruh kebutuhan petani termasuk kebutuhan pupuk. Kelompok tani yang terbentuk juga memudahkan petani dalam merealisasikan penyebaran pupuk yang memang menjadi prasyarat untuk mendapatkan pupuk." (Wawancara dengan AR Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kelembagaan petani dalam kegiatan pengelolaan pertanian holtikultura mendukung segala program pemerintah demi meningkatkan produktivitas petani. Melalui kelembagaan tersebut juga menjadi acuan pemerintah dalam penyebaran pupuk subsidi bagi masyarakat.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan.

Kelembagaan masyarakat melalui kelompok tani membuat program pemberian bantuan lebih efektif dari pihak swasta. Para pelaku usaha tidak lagi memberikan bantuan kepada satu orang yang dapat memicu kecemburuan sosial dari sesame petani. Melalui bantuan terhadap kelompok dapat menopang semua kebutuhan petani yang tergabung dalam kelompok tersebut.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> "Adanya pengorganisasian masyarakat seperti pembentukan kelompok tani tentu memudahkan kami dalam proses penyaluran bantuan, seperti pupuk misalnya. Jadi kami tinggal menghitung berapa jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tersebut shingga penyebarannya dapat merata dan tidak memicu kecemburuan sosial terhadap sesame petani." (Wawancara dengan AD Tanggal 16/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberian bantuan pertanian dari pelaku usaha kepada petani jauh lebih efektif melalui kelembagaan yang mampu menginisiasi semua kebutuhan petani dalam pengelolaan pertanian masyarakat.

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Kesibukan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian serta kurangnya pemahaman dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah membuat masyarakat yang berprofesi sebagai petani menunjuk orang yang berkompeten di antara mereka menjadi ketua kelompok tani sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah daerah.

> "Tentu kami petani sangat sibuk dalam mengelola lahan pertanian, sehingga dengan adanya kelembagaan seperti kelompok tani mampu menampung seluruh permintaan dan kebutuhan masyarakat petani. Dalam penunjukkan sebagai ketua kelompok tani kami memilih orang-orang yang memang memiliki kecakapan dalam membangun komunikasi kepada pemerintah daerah, yang dekat dengan pemerintah sehingga lebih mudah dalam proses pemenuhan kebutuhan bagi para petani." (Wawancara dengan SM Tanggal 17/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kelompok tani sebagai organisasi yang menaungi para petani menempatkan

seseorang yang memiliki kapabilitas dalam mengarahkan kegiatan pertanian dan mensinergikan dengan program pemerintah Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan petani dapat di komunikasikan dengan baik.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kolaborasi antar pemerintah,swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sector pertanian hortikultura di Kecamatan Rubia Kabupaten Jeneponto. Mengacu pada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan semua sektor baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, menata dan mengatur semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efesien. Kolaborasi adalah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki sebuah kepentingan terhadap masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama untuk mencapai tujuann yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri-sendiri. Proses kolaborasi menunjukkan sebuah system yang dimana kolaborasi mewakili model yang mendominasi untuk perilaku, pengambilan keputusan dan aktivitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kolabolasi yang dilakukan antara pemerintah, swasta,dan masyarakat sudah berjalan secara efektif, sehingga dalam berkolaborasi pengelolaan sektor pertanian hortikultura pihak pemerintahan dinas pertanian dengan pihak swasta dan masyarakat berupaya untuk menjaga hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi

dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Kekompakan yang dilakukan dari pemerintahan dinas pertanian maupun dari swasta dan masyarakat membuat komunikasi antara keduanya berjalan dengan lancar sehingga kolaborasi dalam pengelolaan sektor pertanian hortikultura dapat berjalan dengan baik. Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangatlah bermacam-macam apapun bentuk yang dilakukan baik dalam wujud kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi. Kolaborasi ini bisa dinyatakan sudah efektif karena komunikasi antara pihak yang bekerjasama sudah terjalin dengan baik dan juga kesadaran masyarakat sudah ada sehingga upaya untuk memajukan kolaborasi dalam pengelolaan sektor pertanian hortikultura sudah efektif. Dalam proses penelitian yang dilakukan akhirnya akan memberi dampak. Dari berbagai dampak tentu akan menghasilkan feedback atau umpan balik, dan akan diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud ialah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing pihak yang terlibat seperti yang dapat kita lihat bahwa mengenai dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait masyarakat dalam hal ini petani dalam proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kabupaten Jeneponto terkait keterlibatan kolaborasi oleh masyarakat dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: membangun komunikasi, dalam menyampaikan segala masalah dan kebutuhan pengelolaan pertanian kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha, masyarakat yang berprofesi sebagai petani ikut terlibat dalam mengkomunikasikan permasalahan mereka pada bidang pertanian. Selanjutnya partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi menjadi sentral sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program-program yang mampu menjawab permasalahan petani dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Dan terakhir pengorganisasian, melalui pembentukan kelompok tani segala permasalahan petani di lembagakan menjadi satu sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjalankan program dan menyalurkan bantuan karena para petani telah terdaftar pada lembaga-lembaga kelompok tani tersebut

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai kesimpulan dari judul penelitian terkait *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto ada beberapa unsur yang dapat meningkatkan Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut :

1.Pemerintah dapat di tinjau dari 4 indikator yaitu pembuatan regulasi yang berkaitan dengan landasan hukum dalam kegiatan pertanian holtikultura melalui pembentukan perda. Selanjutnya fungsi koordinasi dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk bekerjasama agar kegiatan pengelolaan pertanian holtikultura dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian fungsi transparansi dimana keterbukaan akses informasi dapat menjadi solusi pemecahan masalah dan penetapan program dalam kegiatan pertanian dan terakhir akuntabilitas atau bisa diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pertanian holtikultura adalah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui komoditi pertanian.

1. Swasta dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, bantuan teknologi dimana para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan alat yang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dapat di manfaatkan petani dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya menciptakan lapangan kerja proses manajemen suatu perusahaan membutuhkan karyawan, dimana dengan pendekatan pemberdayaan para pelaku usaha melakukan perekrutan terhadap masyarakat sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan terakhir peningkatan SDM para pelaku usaha yang berasal dari sektor swasta senantiasa meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan sebagai upaya peningkatan kapastitas SDM dalam pengelolaan pertanian.

2. Masyarakat dapat dilihat dari tiga indikator yaitu: membangun komunikasi, dalam menyampaikan segala masalah dan kebutuhan pengelolaan pertanian kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha, masyarakat yang berprofesi sebagai petani ikut terlibat dalam mengkomunikasikan permasalahan mereka pada bidang pertanian. Selanjutnya partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi menjadi sentral sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program-program yang mampu menjawab permasalahan petani dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Dan terakhir pengorganisasian, melalui pembentukan kelompok tani segala permasalahan petani di lembagakan menjadi satu sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjalankan program dan menyalurkan bantuan karena para petani telah terdaftar pada lembaga-lembaga kelompok tani tersebut.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya secara rutin setiap bulan melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas-dinas terkait masalah pertanian baik dari segi penyuluhan, sarana dan prasarana maupun fasilitas hasil pemasaran untuk menjaga kestabilan pertanian.
2. Sektor swasta harus senantiasa memberdayakan masyarakat dalam upayanya membangun manajemen dalam pengelolaan kegiatan pertanian, selain itu peningkatan kontribusi dalam menyediakan alat-alat pertanian perlu lebih di maksimalkan.
3. Masyarakat harus senantiasa memacu kelembagaan dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Selain itu peningkatan pengetahuan perlu dilakukan agar produktivitas kegiatan pertanian dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Daftar Pustaka

Abidin, Yunus. (2013). *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.

Agus Dwiyanto. (2011). Manajemen Pelayanan Publik. Yogjakarta. Gadjah Mada University Press

Alfan Bachtar Harahap, Rahmanta Ginting, Hasman Hasyim. (2012). *Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Terhadap Petani Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Pematang Setrak, Kec Teluk Mengkudu, Kab Serdang Bedagai)*. USU. Medan.

Ani Sri Rahayu, (2018), Pengantar Pemerintahan Daerah Teori Hukum Dan Aplikasinya, Jakarta, Sinar Grafika.

Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Adminsitration Research and Theory. Published by Oxford University Press.

Ariani, S., (2003). *Peranan Thricoderma harzianum terhadap Kecepatan Dekomposisi Berbagai Sumber Bahan Organic dan Kualitas Kompos yang Dihasilkannya*. Padang: Skripsi Sarjana Pertanian Universitas Andalas.

Asmawi, (2014). "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah", Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1.

Budi Kurniawan, (2015). Desentralisasi atau Resentralisasi. Tinjauan Kritis Terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Bulaksumur.

Chang, Hyun Joo. (2009). *collaborative governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea.Internasional Review of Publik Administration* Vol. 13.Special Issue.

Harijati, Sri. (2007). *Potensi dan Pengembangan Kompetensi Agribisnis Petani Berlahan Sempit*. IPB: Bogor

Junaidi. (2015). *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang*, Tesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau.

Kumorotomo, Wahyudi, dkk. (2013). Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM

Melasari, A., Tavi S, Rahmanta G. (2012). *Analisis Komparasi Usahatani Padi Sawah Melalui Sistem Tanam Jajar Legowo dengan Sistem Tanam Non Jajar Legowo di Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau. Kabupaten Deliserdang*. USU

Morse, R. S & Stephens, J. B.(2012). *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*. Journal of Public Affairs Education, 18(3), 565-584

Muhammad Firdaus. 2012. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta. PT Bumi Aksara

Noorlatifah dan Hamdani. 2012. *Struktur Biaya dan Penerimaan Usahatani Nanas Madu (Ananas sativus) di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas*. Jurnal Agribisnis Pedesaan 02 (01):1-10.

Nurmala, dkk. (2012). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarat: Graha Ilmu

Purwanti, Nurul D. (2016). *Collaborative Governance* (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM

Safaruddin, M. Shawal dan Muhammad Arsyad.(2010). *Kontribusi Penyuluhan Terhadap Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani (Kasus Petani Padi) di Kabupaten Luwu Utara*. Makassar

Sedarmayanti, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Refika Aditama Eresco.

Serajuddin, (2016), Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang, Setara Press.

Setyowati, Sri, (2007), *Asuhan Keperawatan Keluarga Konsep dan Aplikasi Kasus*, Jogjakarta: Mitra Cendekia.

Sobir. (2009). *Buku Pintar Budidaya Tanaman Buah Unggul Indonesia. Agromedia Pustaka*. Jakarta. Hal: 274-275.

Subarsono, Agustinus. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sudarmo, (2009). *Elemen –Elemen collaborative Leadiership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapai Effektivitas collaborative governance*. Jurnal Spirit Publik. Vol. 5 No.2

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

_____, (2010). Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance. Surakarta: UNS

Ulum, M.Chazienul dan Rispa Ngindana. (2017). *Environmental Governance: Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup.* Malang: UB Press.

Vieta Imelda Cornelis,(2016). Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Surabaya.

Zulkarnain. (2009). *Dasar-dasar Hortikultura.* Jakarta: Bumi Aksara.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIODATA PENULIS

RAHMAD NUR, Lahir di Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 03 Maret 1998. Anak Ketiga dari 3 Bersaudara dari pasangan Muhammad dan Nurhayati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 226 Patande Kecamatan Malili Kabupaten Malili tahun 2004. Pada tahun 2010 menyelesaikan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 1 Malili dan tamat di SMA Negeri 1 Malili pada tahun 2016. kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (SOSPOL) Universitas Muhammadiyah Makassar sampai tahun 2021.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis giat dalam mengikuti perkuliahan dikampus dan mengikuti seminar yang diadakan oleh kampus. Untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan menulis skripsi dengan judul "**Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto**".

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN